



GEMAH RIPA H L CH JINAWI



RENCANA KINERJA TAHUNAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON TA 2022

Jalan Rarasantang I No. 1 Komplek Perkantoran Bima
Kesambi Cirebon 45132

KATA PENGANTAR

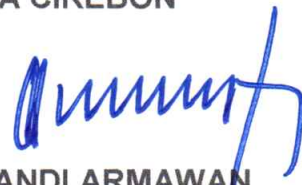
Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami memanjatkan puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang telah diberikan, sehingga Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2022 dapat selesai tepat pada waktunya.

RKT ini berisi penjelasan Program dan Kegiatan serta Prakiraan maju anggaran Tahun 2022 secara keseluruhan bidang – bidang / UPTD yang ada di Dinas Perhubungan Kota Cirebon, sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas pada manajemen identitas pelaporan.

Semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja ini, Dinas Perhubungan Kota Cirebon ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media penjabaran Rencana Strategis serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja di bidang perhubungan serta dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kota Cirebon Tahun 2018 - 2023 yakni dengan visi Walikota terpilih adalah “*SEHATI KITA WUJUDKAN KOTA CIREBON SEBAGAI KOTA KREATIF BERBASIS BUDAYA DAN SEJARAH*”.

Cirebon, Januari 2022

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA CIREBON**



Drs. ANDI ARMAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19691214 199003 1 005

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Cirebon. Konsekuensi perubahan peraturan tersebut diatas, maka Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2018 – 2023. Pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapat dorongan yang besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif.

Perencanaan dibagi menjadi tiga bagian antara lain Rencana jangka panjang dengan periode 20 tahun, Rencana jangka menengah dengan periode 5 tahun dan periode tahunan.

Rancangan Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan tahun 2022 untuk selanjutnya disebut RKT Dinas Perhubungan Tahun 2022. Rencana Kerja ini disusun berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang mewajibkan setiap Organisasi perangkat Daerah atau yang disingkat OPD membuat Rencana Kerja yang mengacu pada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Perhubungan Kota Cirebon tahun 2022 merupakan rencana kerja tahun kedua (kedua) pelaksanaan Rencana Strategis tahun 2019 – 2023 Dinas atau dengan kata lain merupakan kelanjutan rencana kerja tahunan Dinas tahun 2021.

Atas dasar alur tersebut Dinas Perhubungan Kota Cirebon menyusun Rancangan Rencana Kerja tahun 2022 yang menyajikan target kinerja tahun 2022 dalam upaya pelaksanaan amanat yang tertuang dalam Rencana Strategik serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yang sekaligus merupakan komitmen Dinas Perhubungan untuk mewujudkan Visi-nya " TERWUJUDNYA PELAYANAN PERHUBUNGAN YANG SANTUN MENUJU KOTA CIREBON RAMAH TAHUN 2018 " .

Pelayanan yang diharapkan adalah pelayanan yang SANTUN merupakan kepanjangan dari Selamat, Aman, Nyaman, Tertib dan Unggul di bidang Perhubungan serta pelayanan administrasi.

- **Selamat** diindikasikan oleh menurunnya angka kecelakaan transportasi;
- **Aman** diindikasikan oleh menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi;
- **Nyaman** diindikasikan oleh tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang nyaman bagi pengguna jasa transportasi;
- **Tertib** diindikasikan oleh terselenggaranya kesadaran masyarakat atau pengguna jasa transportasi dalam menggunakan moda transportasi yang tertib sebagai bentuk pelayanan transportasi yang tertib berlalu lintas;
- **Unggul** diindikasikan oleh meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan.

Untuk mencapai Visi Dinas Perhubungan Kota Cirebon, ditetapkan Misi yang harus dilakukan yaitu " *Meningkatkan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* "

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Idiil dan landasan konstitusional Dinas Perhubungan adalah Pancasila dan Undang-undang 1945 sedangkan landasan operasionalnya meliputi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan langsung dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2015;
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2009 tentang Retribusi Penyelenggara Perhubungan;
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Jasa Perijinan Tertentu;
24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D,

- Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
26. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
 27. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Menetapkan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program dan kegiatan yang akan menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Cirebon sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun 2022.

b. Tujuan

- Merumuskan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tupoksi Dinas Perhubungan Kota Cirebon
- Menetapkan usulan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan serta target dalam pencapaian kinerja pada tahun anggaran mendatang.

1.4 RENCANA KINERJA

Untuk mengontrol kegiatan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang diharapkan, maka perlu dilaksanakannya rencana kinerja yang sesuai. Berikut adalah tabel rencana kinerja tahunan Dinas Perhubungan Kota Cirebon

**TABEL RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN 2022**

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2022	
					TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
MISI 3 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan						
		Meningkatnya Pelayanan Kapasitas Jalan		Persentase Peningkatan Level Of Service Ruas Jalan	3	Persen
		Menurunnya Titik Rawan Kemacetan Lalu Lintas		Jumlah Titik Rawan Kemacetan	1	Titik
		Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	95	Persen
		DINAS PERHUBUNGAN				
		NON URUSAN				
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1. Terwujudnya tertib pelayanan administrasi perkantoran	100	persen
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Keluaran : Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	7	jenis
				Hasil: Terpenuhinya Informasi Perencanaan Sebagai Bahan dan Acuan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah	100	persen
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dokumen Renja PD	1	dokumen
				Dokumen Renja PD Perubahan	1	dokumen
				Dokumen Renstra PD	0	dokumen
				Dokumen Renstra Perubahan PD	0	dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Dokumen RKA	1	dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Dokumen RKA Perubahan	1	dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Dokumen DPA	1	dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Dokumen DPA Perubahan	1	dokumen
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Laporan pelaksanaan realisasi kinerja tahunan	1	dokumen
				Laporan pelaksanaan realisasi kinerja triwulan	4	dokumen
				Laporan PK	1	dokumen
				Tersedianya Honor PTT	1	orang
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Dalev Triwulan I, II, dan III	3	dokumen
				Dokumen Dalev Triwulan IV	1	dokumen
				Dokumen SOP Dishub	1	dokumen
				LAKIP	1	dokumen
				LKPJ	1	dokumen
				LPPD	1	dokumen
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Keluaran: Dokumen Administrasi Keuangan	2	jenis
				Hasil: Terpenuhinya Informasi Administrasi Keuangan Sebagai Bahan Audit Keuangan Perangkat Daerah	100	Persen
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	117	orang
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Laporan keuangan akhir tahun (CALK)	1	dokumen
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Keluaran: Dokumen Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	jenis
				Hasil: Terwujudnya Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100	Persen
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Pakaian dinas harian	250	stel
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Keluaran: Dokumen Administrasi Umum	6	jenis

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2022		
					TARGET	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	
				Hasil: Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor Perangkat Daerah	100	Persen	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Alat Tulis Kantor	50	item	
				Materai 10.000	1350	buah	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Isi tabung LPG 12 kg	12	kali	
				Tabung APAR	20	unit	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang cetakan	11	jenis	
				Penggandaan	51956	lembar	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Buku / Peraturan Perundang-undangan	5	buku	
				Surat Kabar Harian Lokal	3	koran / media	
				Surat Kabar Harian Nasional	1	koran / media	
				Surat Kabar Harian Regional/Provinsi	1	koran / media	
				Terpasangnya Iklan di surat kabar harian	60	iklan	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan penerimaan/ kunjungan tamu	12	laporan	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan makanan dan minuman harian pegawai	12	laporan	
				Laporan/ Notulensi rapat internal/briefing	12	laporan	
				Laporan hasil pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	laporan	
				Laporan sinergitas	1	laporan	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Keluaran: Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	jenis	
				Hasil: Terpenuhinya pengadaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	Persen	
			Pengadaan Mebel	Mebeleur	2	jenis	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan gedung kantor	4	jenis	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan gedung kantor	2	jenis	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan R4	2	unit	
				Kendaraan R2	6	unit	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran: Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	Jenis	
				Hasil: Terpenuhinya jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Persen	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Struk pembayaran tagihan rekening air (PDAM)	36	struk rekening	
				Struk pembayaran tagihan rekening telepon	12	struk rekening	
				Struk pembayaran tagihan rekening TV Satelit	36	struk rekening	
				Struk pembayaran tagihan rekening listrik	36	struk rekening	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Petugas/Tenaga pengamanan	15	orang	
				Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	28	jenis	
				Petugas/ Tenaga kebersihan kantor	8	orang	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Keluaran: Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	jenis	

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2022	
					TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
				Hasil: Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BBM Kendaraan R4	1 unit	
				Pelumas Kendaraan R4	1 unit	
				Servis Kendaraan R4	1 unit	
				Suku cadang Kendaraan R4	1 unit	
				STNK/SKPD PKB R4	1 unit	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	KIR Pick Up	4 unit	
				KIR Truk	3 unit	
				STNK/SKPD PKB Bus dan Truk	3 unit	
				STNK/SKPD PKB R2	32 unit	
				STNK/SKPD PKB R3	3 unit	
				STNK/SKPD PKB R4	4 unit	
				BBM Kendaraan R2	32 unit	
				BBM Kendaraan R3	3 unit	
				BBM Kendaraan R4	8 unit	
				BBM Kendaraan R6	3 unit	
				Pelumas Kendaraan R2	32 unit	
				Pelumas Kendaraan R3	3 unit	
				Pelumas Kendaraan R4	8 unit	
				Pelumas Kendaraan R6	3 unit	
				Servis Kendaraan R2	32 unit	
				Servis Kendaraan R3	3 unit	
				Servis Kendaraan R4	8 unit	
				Servis Kendaraan R6	3 unit	
				Suku Cadang Kendaraan R2	32 unit	
				Suku Cadang Kendaraan R3	3 unit	
				Suku Cadang Kendaraan R4	8 unit	
				Suku Cadang Kendaraan R6	3 unit	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor	3 unit kantor	
				Pengadaan dan pemeliharaan pagar dan gapura kantor Dukuh Semar	28 Meter	
				Pengaspalan dan Pemeliharaan Kawasan Terminal Dukuh Semar	939 M2	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Peralatan gedung kantor	3 Jenis	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Perlengkapan gedung kantor	3 Jenis	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
			URUSAN PERHUBUNGAN			
			Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1. Pemasangan Rambu rambu((jumlah pemasangan rambu/jumlah rambu yang seharusnya tersedia) x 100%)	10 persen	
				2. Rasio Konektivitas kabupaten/kota ((jumlah trayek yang dilayani di kab/kota x bobot trayek)/jumlah kebutuhan trayek pada kota/kab)	80 persen	
				3. Persentase Pelayanan Parkir Kendaraan ((Jumlah Lokasi Parkir Yang Terdapat Jukir Dan Fasilitas Parkir/Total Jumlah Lokasi Parkir) x 100%)	93 persen	
				4. Persentase Terlaksananya Uji Berkala Kendaraan Bermotor ((jumlah kendaraan yang diuji per tahun / jumlah kendaraan wajib uji) x 100%)	78 persen	

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2022	
					TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
				5. presentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota (jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten/kota / target kebutuhan perlengkapan jalan kab kota x 100%)	100 persen	
				6. Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan ((jumlah jalan yang terlaksana audit dan inspeksi/total keseluruhan jalan) x 100%)	100 persen	
				7. Persentase layanan angkutan darat ((jumlah angkutan darat/jumlah penumpang angkutan darat) x 100%)	1,53 persen	
				1. Pemasangan Rambu rambu (jumlah pemasangan rambu/jumlah rambu yang seharusnya tersedia x 100%)	10 persen	
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Keluaran: Dokumen Penyediaan Perlengkapan Jalan	3 Jenis	
				Hasil: Terwujudnya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	100 persen	
			Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Halte	3 halte	
				pengadaan parkir khusus sepeda	2 unit	
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Pengadaan Kendaraan Operasional Pelayanan UPT PJU	2 unit kendaraan	
				Pemasangan PJU di tempat/jalan yang belum terpasang sesuai peraturan	300 titik	
				Pemeliharaan PJU	8613 Titik	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	pemeliharaan marka jalan untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas	1000 m2	
				Lokasi rambu lalu lintas yang dipelihara untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas	50 titik	
				pelayanan ATCS dan Amdalalin Dinas Perhubungan Kota Cirebon	3 orang	
				Lokasi traffic light yang dipelihara untuk menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas	32 titik simpang	
				2. Rasio Konektivitas kabupaten/kota ((jumlah trayek yang dilayani di kab/kota x bobot trayek)/jumlah kebutuhan trayek pada kota/kab)	80 persen	
			Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Keluaran : Dokumen Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1 Jenis	
				Hasil : Terwujudnya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	80 persen	
			Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	dokumen sistem pelayanan terminal penumpang tipe C yang aman, nyaman dan ramah	1 dokumen	
				3. Persentase Pelayanan Parkir Kendaraan ((Jumlah Lokasi Parkir Yang Terdapat Jukir Dan Fasilitas Parkir/Total Jumlah Lokasi Parkir) x 100%)	93 persen	
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Keluaran : Dokumen Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2 Jenis	

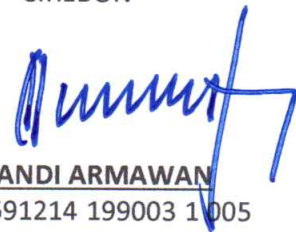
NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2022	
					TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
				Hasil : Terwujudnya Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		
			Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kab/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pembinaan Petugas Parkir	4 kali	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	buku karcis, bbm, atk	1 tahun	
				dokumen kajian potensi parkir dan Dokumen kajian manajemen rekayasa perparkiran	1 dokumen	
				4. Persentase Terlaksananya Uji Berkala Kendaraan Bermotor ((jumlah kendaraan yang diuji per tahun / jumlah kendaraan wajib uji) x 100%)	78 persen	
			Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Keluaran : Dokumen Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4 Jenis	
				Hasil : Terwujudnya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100 persen	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	barang cetakan, bahan baku bangunan dan BBM	1 tahun	
			Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Peningkatan SDM Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5 orang	
			Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dalam Bentuk <i>Smart Card</i>	2 jenis	
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	kestabilan dan akurasi alat uji laik jalan kendaraan bermotor	100 persen	
			Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	12 laporan	
				5. presentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota (jumlah pemasangan perlengkapan jalan kabupaten/kota / target kebutuhan perlengkapan jalan kab kota x 100%)	100 persen	
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Keluaran : Dokumen Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	3 Jenis	
				Hasil : Terwujudnya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	100 persen	
			Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	pengadaan apill	1 titik simpang	
				Pemeliharaan Halte	0	
				pengadaan rambu - rambu lalu lintas untuk menunjang keselamatan dan kelancaran berlalu lintas	100 buah	
				pengadaan jalur sepeda	500 M2	
				pengelolaan website	1 laporan	

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2022	
					TARGET	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
			Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	sosialisasi terkait kebijakan teknis perhubungan	2 kali	
			Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Menekan tingkat kecelakaan dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan (operasi penertiban gabungan dengan polisi)	1 tahun	
				Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan Angkutan Umum	2 Kali	
				Personil Pelayanan angkutan lebaran, Natal dan Tahun Baru	3 Kali	
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Forum Perangkat Daerah	2 dokumen	
				6. Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan (jumlah jalan yang terlaksana audit dan inspeksi/total keseluruhan jalan) x 100%	100 persen	
			Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Keluaran : Dokumen Audit dan Inspeksi Keselamatan di Jalan	2 Jenis	
				Hasil : Terwujudnya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	100 persen	
			Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Pelajar pelopor keselamatan untuk tingkat SMA se kota Cirebon terpilih	3 orang	
				Dokumen hasil audit dan investigasi keselamatan lalu lintas	0 dokumen	
			Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Dokumen lomba tertib lalu lintas dan angkutan jalan (WTN)	1 dokumen	
				sosialisasi tentang disiplin kepada masyarakat dalam menggunakan angkutan umum untuk mengurangi tingkat kemacetan lalu lintas	0 Kali	
				sosialisasi / penyuluhan kepada masyarakat terhadap ketertiban berlalu lintas di jalan	0 Kali	
				pemberian pengetahuan tentang pentingnya keselamatan di jalan raya untuk pengguna jalan	50 orang	
				7. Persentase layanan angkutan darat (jumlah angkutan darat/jumlah penumpang angkutan darat×100%)	1,53 persen	

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TAHUN 2022		
					TARGET	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	6	7	
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Dokumen Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	1	Jenis	
				Hasil : Terwujudnya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	27,35	persen	
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Trayek BRT di Kota Cirebon	1	Lintasan trayek	
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Dokumen Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah	1	Jenis	
				Hasil : Terciptanya pengetahuan bagi para sopir/juru mudi terhadap aturan dalam berlalu lintas di jalan	90	Persen	
			Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Pembinaan sopir / awak angkutan umum	50	orang	
				Terpilihnya awak angkutan umum teladan tingkat kota cirebon	3	orang	
				Teridentifikasinya armada dan krew angkutan kota di masing-masing trayek	979	supir angkot	

Cirebon, Januari 2022

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA
CIREBON



Drs. ANDI ARMAWAN
NIP. 19691214 199003 1005

1.5 Kesimpulan

Dalam upaya mendukung terwujudnya Visi, Misi Kota Cirebon dan Wali Kota Cirebon, Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT OPD) periode tahun 2022. RKT merupakan pedoman bagi Dinas dalam melaksanakan program dan kegiatan khususnya untuk satu tahun mendatang. RKT Dinas disusun berdasarkan kondisi lingkungan strategis yang mempengaruhi kinerja dinas, diantaranya permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang tentu saja disesuaikan dengan program dan kegiatan Wali Kota.

Rencana Kerja Tahunan Dinas Perhubungan memuat Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan Dinas yang kemudian di breakdown lagi menjadi program dan kegiatan. Semua aspek merupakan kristalisasi dari usulan, saran, masukan, dan aspirasi tiga bidang, satu sekretariat dan tiga UPT.

1.6 Saran

Perlu dukungan dan komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh karyawan dinas dalam upaya mewujudkan apa yang sudah tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan. Dukungan dari luar OPD juga tidak kalah pentingnya berkaitan dengan anggaran dan penyediaan sarana dan prasarana aparatur untuk mengatasi permasalahan yang ada di Dinas Perhubungan Kota Cirebon.